



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RENGGO BUONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 757395

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.605.000.000

1. Tanah Seluas 952 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 96 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 790 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 1340 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 285.000.000
6. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 70.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI L300 Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.400.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	4.000.000
Sub Total	Rp.	1.758.200.000
III. HUTANG	Rp.	109.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.649.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.